



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji, syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk komitmen dan cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dan seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja di masa mendatang dan bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPAEN GRESIK



A.M. REZA PAHLEVI, A.P

Pembina Tk. I

NIP 740803 199311 1 001

RINGKASAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022. Sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari dua sasaran dimana sasaran I terdiri dua indikator kinerja yang diampu oleh dua urusan yaitu urusan keuangan (bidang anggaran dan perbendaharaan) dan urusan aset (bidang pengelolaan aset) sedangkan sasaran II terdiri dari satu indikator kinerja yang diampu oleh bidang urusan pendapatan (diampuh oleh tiga bidang pendapatan).

Capaian kinerja sasaran strategis I “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator kinerja Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan telah mencapai realisasi sebesar 100,00% sesuai target yang telah ditetapkan hal ini berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**, dan pada indikator kinerja Persentase Data Aset yang Akurat telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100,12% yang berarti kinerja yang dicapai telah berhasil dan masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Pada capaian kinerja sasaran strategis II “Meningkatnya Pendapatan Daerah” dengan indikator kinerja Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai realisasi kinerja sebesar 7,45% yang sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 1,95% masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Dengan demikian dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	LATAR BELAKANG..... 1
1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1
1.2	Personil/Pegawai 2
1.3	Dukungan Anggaran 3
1.4	Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 4
1.5	Permasalahan Utama 5
1.6	Sistematika Pelaporan 12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA..... 14
2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 14
2.2	Cascading Kinerja 14
2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 15
2.4	Perjanjian Kinerja 16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 17
A.	CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022 17
3.1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 17
3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 18
3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan Target Akhir RENSTRA..... 19
B.	REALISASI ANGGARAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022 20
3.4	Efektifitas Penggunaan Sumber Daya 21
Sasaran I (MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) 22	
Sasaran II (MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH) 24	
BAB IV	PENUTUP 26
4.1	Kesimpulan 26
4.2	Saran 27

BAB I

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Kepala badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 224 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

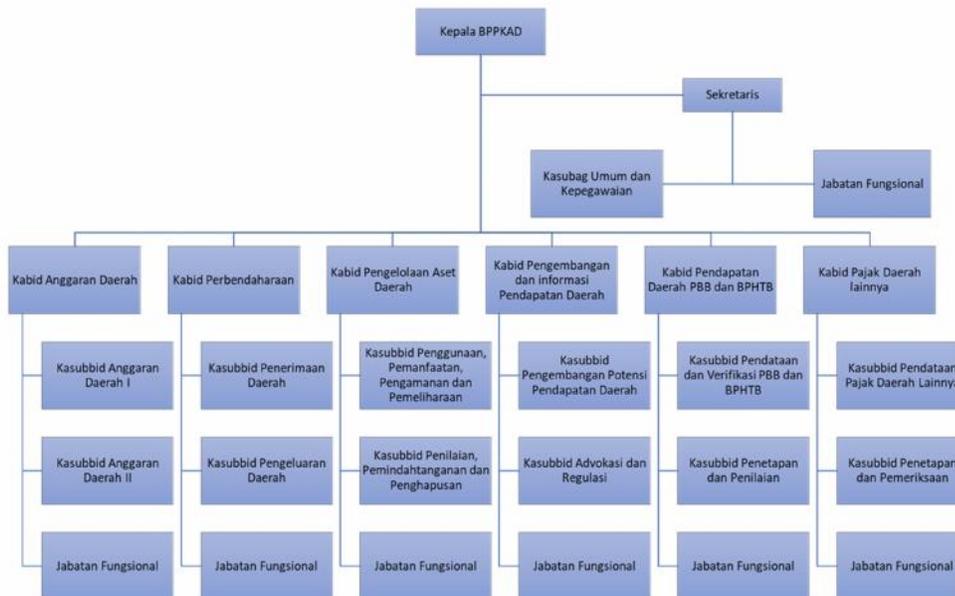
Merumuskan, mengatur , membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Fungsi

- ✓ Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

- ✓ Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- ✓ Pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- ✓ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Kerangka Struktur Organisasi



1.2 Personil / Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 101 (seratus satu) orang yang terdistribusikan ke dalam unit-unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian PNS BPPKAD Kabupaten Gresik

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Jenis Kelamin	
			Laki - laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	1	-
2	Sekretariat	17	7	10
3	Bidang Pajak Daerah Lainnya	12	7	5
4	Bidang PBB dan BPHTB	18	16	2
5	Bidang Pengembangan Informasi	8	5	3
6	Bidang Anggaran	11	1	10
7	Bidang Perbendaharaan	20	6	14
8	Bidang Pengelolaan Aset	14	8	6
9	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Gresik	5	4	1
10	UPT Pelayanan Pajak Wilayah Bawean	6	4	2
	Jumlah	112	58	53

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian BPPKAD Kabupaten Gresik Per 31 Desember 2022

1.3 Dukungan Dana

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 Rp.1.011.041.623.743,- (*Satu trilyun sebelas milyar empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*) dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar Rp. 930.675.430.991 (*Sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) ada peningkatan sebesar Rp.80.366.192.752,- (*Delapan puluh tiga ratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) atau 8,42 %.

1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Gresik Nomor X.700.04/1152/437.72/2022 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021. Berikut ini dapat kami sampaikan upaya perbaikan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud :

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar dalam penerapan pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi	Penerapan Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam Menyusun perencanaan yang lebih berorientasi kinerja telah dituangkan dalam salah satu SOP pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan skenario evaluasi kinerja
2	Agar dalam penyajian informasi dan/atau pelaporan selalu berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelaporan	Telah disajikan informasi atau pelaporan berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelaporan terdapat dalam laporan monitoring dan evaluasi hasil rencana kerja
3	Agar informasi kinerja dapat digunakan dalam menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (Penganggaran berbasis kinerja)	Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2021 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah disusun sesuai standar dan akan dilakukan peningkatan dalam penyajian hasil kinerja kedepannya.
4	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja dapat mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian, untuk menuju atau mencapai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah dilakukan monitoring dan pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja oleh pimpinan dan hasil evaluasi dijadikan salah satu bahan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPPKAD kedepannya

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) antara lain:

Tabel 3.1. Matriks Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPKAD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

Visi: Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan BPPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.			
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Penyampaian KUA-PPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	1. Penyusunan KUA – PPAS menggunakan aplikasi SIPD, baru dapat dilakukan setelah tahapan RKPD selesai dan data transfer ke tahapan KUA-PAS	1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD
		2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu	2. Proses entri RKA-SKPD menggunakan aplikasi SIPD yang seringkali mengalami gangguan	2. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman, tahapan dan jadwal Penyusunan APBD

		3. Terdapat Ketidak tepatan dalam penganggaran belanja kegiatan	3. Kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM OPD dalam hal perencanaan/ penganggaran	3. Penerbitan SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi / FGD tentang Regulasi di bidang penganggaran
		4. Implementasi SIPD belum bisa dilaksanakan sepenuhnya	4. Koordinasi dengan pusat tidak berjalan cepat	4. Adanya penyesuaian SIPKD terhadap perkembangan sistem pengelolaan keuangan
		5. Kesalahan pengajuan SPM dan keterlambatan penyerahan bukti setoran dari OPD	5. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian pengelola keuangan OPD	5. Adanya verifikasi
		6. Molornya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan bendahara dan KPA dari OPD	6. Keterlambatan surat usulan bendahara dan KPA dari OPD serta proses penetapan SK yang cukup lama	6. Permintaan usulan kepada OPD dapat disampaikan lebih awal
		7. Masih adanya kesalahan penatausahaan keuangan	7. SDM pengelola keuangan OPD yang belum memadai	7. Dapat diusulkan formasi tenaga pengelola keuangan atau dilakukan pendistribusian secara proposional tenaga tersedia
		8. Masih terdapatnya selisih mutasi transfer masuk dan keluar	8. Pemahaman dan ketelitian petugas pengelola keuangan yang masih kurang	8. Adanya bimtek / pelatihan bagi pengelola keuangan OPD

		9. Pembahasan Laporan Keuangan di DPRD yang terkadang tidak sesuai jadwal yang ditentukan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target tanggal penetapan laporan	9. Belum adanya komitmen bersama dalam melaksanakan jadwal/siklus penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD	9. Adanya tuntutan penyediaan laporan keuangan tepat waktu dan dapat dikoordinasikan dengan lebih baik
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM	1. Keterbatasan Jumlah SDM.	1. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pelaksanaan pemanfaatan oleh pihak ketiga lebih maksimal.
		2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran	2. Keterbatasan Anggaran	2. Perlu adanya anggaran untuk kegiatan pemagaran
		3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah	3. Keterbatasan Jumlah SDM pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah	3. Perlu adanya penambahan SDM sehingga pendataan aset daerah lebih cepat
		4. Adanya keterlambatan beberapa OPD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah	4. Kurangnya koordinasi OPD pengguna Barang Milik Daerah	4. Perlunya adanya Sosialisasi terkait Pelaporan Barang Milik Daerah
		5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus	5. Lelang Barang Milik Daerah berpotensi menimbulkan masalah kehilangan barang dengan tidak adanya gudang penyimpanan	5. Diupayakan jika memungkinkan untuk dibangun Gudang Penyimpanan Barang

		6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang	6. Penilaian Barang Milik Daerah masih bergantung pada bantuan pihak luar (penilai dan DJKN / KPNL) sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai schedule menunggu jadwal kesediaan dari instansi dimaksud dan sifatnya terbatas	6. Diupayakan PEmerintah Kabupaten Gresik agar merekrut Pegawai dengan Kompentensi Penilaian atau membekali SDM yang ada lewat pendidikan dan pelatihan
		7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	7. Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran / PPK dengan Pengelola Barang di OPD	7. Rekonsiliasi internal antara bendahara keuangan / PPK dengan pengurus barang OPD dilakukan secara rutin
		8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat	8. Belum adanya keselarasan kompetensi pengurus barang milik daerah di OPD	8. Dilaksanakannya bimbingan teknis bagi pengurus barang daerah
		9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal	9. Belum selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku	9. Adanya update pada modul aplikasi secara berkala
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat	1. Keterbatasan SDM pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah	1. Ketersediaan berbagai lembaga survey / perguruan tinggi yang dapat diajak bekerja sama

		2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah	2. Keterbatasan SDM yang berkompeten	2. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	3. Pemetakan ASN belum sesuai dengan Kemampuan	3. Tersedianya sejumlah pegawai yang siap untuk dikembangkan potensinya
		4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid	4. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	4. Masih banyak WP yang kooperatif
		5. Penjaringan Wajib Pajak Baru belum mencerminkan kondisi riil.	5. Pertumbuhan potensi pajak baru belum diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / pendaftaran WP baru	5. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD
		6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan pajak daerah belum optimal	6. Rendahnya kualitas pemutakhiran data status objek pajak	6. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		7. Sulitnya melakukan penagihan karena data wajib pajak dan objek pajak PBB yang kurang jelas	7. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	7. Adanya dukungan kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB

		8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid	8. Kecenderungan WP tidak memberitahukan data yang sebenarnya	8. Masih banyak WP yang kooperatif
		9. Adanya ketidaksesuaian data di SPPT dengan kondisi riil	9. Terjadinya perubahan data objek, subjek maupun wajib pajak tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang khusus melakukan pendataan / Pendaftaran WP baru	9. Dilakukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM OPD
		10. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja operasional pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal	10. Belum adanya sistem monitoring, evaluasi pengawasan kinerja pemungutan pajak daerah yang berkesinambungan	10. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pemungutan pajak
		11. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal	11. Koordinasi yang belum berkesinambungan	11. Adanya dukungan instansi terkait dalam beberapa pelaksanaan program dan kegiatan BPPKAD
		12. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB	12. Rendahnya Pemahaman Petugas Pelayanan terhadap tugas dan fungsinya	12. Adanya Penawaran dari berbagai instansi/ Penyelenggaraan Diklat / Bimtek terkait PBB

		13. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan	13. Adanya keterbatasan anggaran	13. Sarana dan prasarana yang masih dapat difungsikan dilakukan pemeliharaan dengan baik
		14. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat	14. Layanan informasi yang belum berfungsi optimal	14. Masih dilakukannya penataan layanan informasi secara bertahap
		15. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil	15. Belum dilakukannya penyesuaian NJOP terhadap harga pasar	15. Dilakukannya pemutakhiran nilai ZNT di Kabupaten Gresik pada 18 Kecamatan
		16. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal	16. Belum terintegrasinya seluruh system pengelolaan keuangan yang ada	16. Masih dilakukannya penetapan integrasi sistem pengelolaan keuangan secara bertahap
		17. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal	17. Belum adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan	17. Tersedianya sumber daya untuk verifikasi / pemeriksaan terhadap objek / subjek pajak daerah
		18. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas.	18. Terjadinya mutasi objek pajak yang tidak sesuai prosedur ataupun tidak dilaporkan	18. Adanya dukungan Kepala Desa / Lurah untuk menertibkan data PBB

1.6 Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2022, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam okumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran ini berisi data dukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

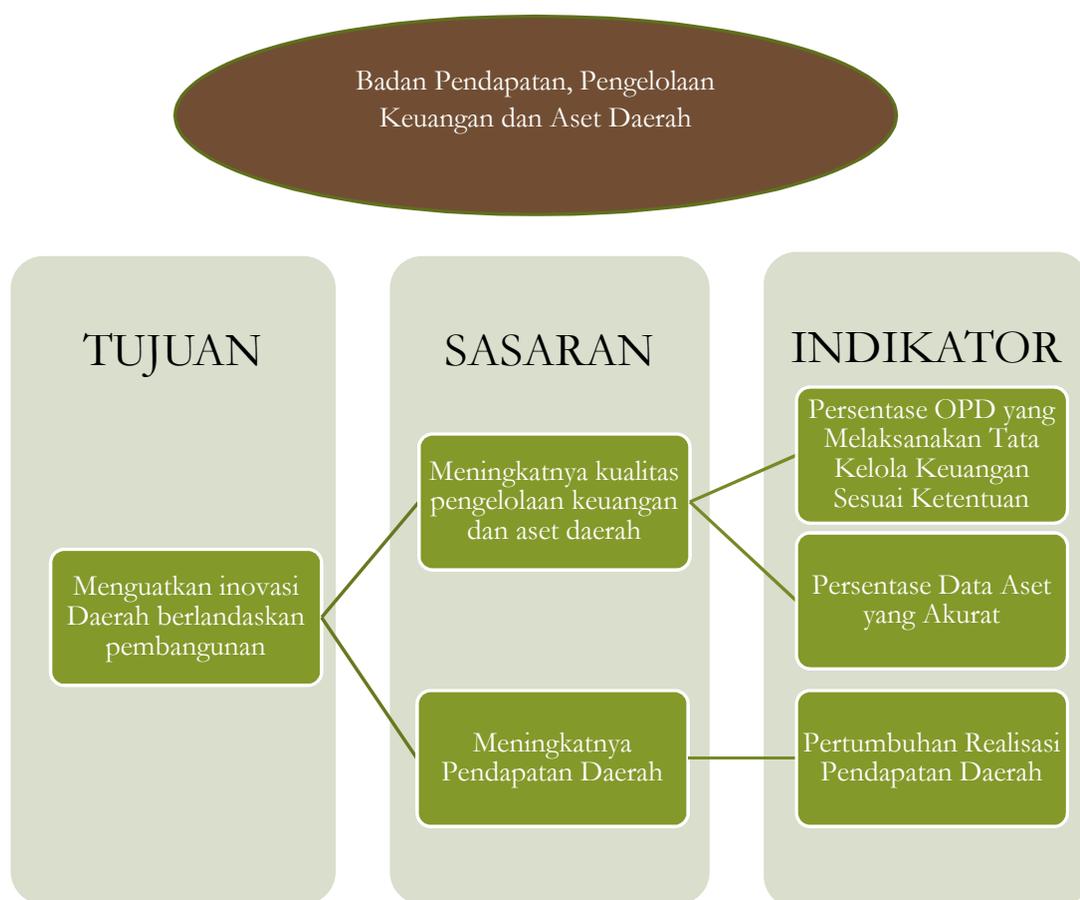
2.2 CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

TUJUAN 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan
Indikator : Indeks Inovasi Daerah



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi

SASARAN	IKU	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah PD yang Melaksanakan tata Kelola Keuangan / Jumlah Total PD x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	100% dikurangi(((Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan unaudit dikurangi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dibagi Jml Aset Daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dikali 100%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	((Pendapatan Daerah Tahun n - Pendapatan Daerah Tahun n-1)/Pendapatan Daerah Tahun n-1) kali 100%	11,29 %	1,95%	3,17%	3,49%	3,56%	3,63%
--------------------------------	---	---	---------	-------	-------	-------	-------	-------

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai berikut :

Halaman 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

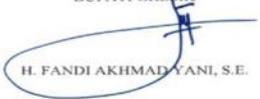
Nama : Dra. NURI MARDIANA, M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 27 Januari 2022
PIHAK KESATU
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. NURI MARDIANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 198809 2 001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Halaman 2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPPKAD KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100 %
		2	Persentase Data Aset yang Akurat	90 %
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	1.95 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 60,017,361,247	APBD
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 861,420,740,335	APBD
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 3,973,270,300	APBD
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 7,217,075,290	APBD
Jumlah			Rp. 932,628,447,172	

Gresik, 27 Januari 2022
PIHAK KESATU
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dra. NURI MARDIANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 198809 2 001

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dengan Bupati Gresik Tahun 2022. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana berikut :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% - <100%	Sangat Tinggi
2	76% - < 90%	Tinggi
3	66% - < 75%	Sedang
4	51% - < 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 dapat diukur melalui indikator kinerja pada Tujuan dan indikator kinerja pada Sasaran Strategis sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		CAPAIAN
				TARGET	REALISASI	
1	Menguatkan Inovasi Daerah berlandaskan Pembangunan Kolaborasi di semua Level Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
			2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	100,12%	111%
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	1,95%	7,45%	382%

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah capaian kinerjanya masuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**”

3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2022 dengan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,96%	111%	90%	100,12%	111%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	11,29%	6,59%	58%	1,95	7,45	382%

Dari tabel diatas untuk 3 Indikator Kinerja tahun 2022 meningkat untuk capaiannya dari tahun 2021, hanya 1 Indikator Kinerja (Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan) yang tidak meningkat atau menurun tetapi masih di angka 100% capaiannya. Dan untuk hasil dari 3 Indikator Kinerja tahun 2022 masuk dalam kategori “ **Sangat Tinggi**”. Berbeda dengan tahun 2021 ada 1 Indikator Kinerja (Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah) yang masuk kategori “**Rendah**”.

3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan Target Akhir RENSTRA

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7*100
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	600%	16,67%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	99,96%	111%	540%	18,51%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	11,29%	6,59%	58%	27,09%	24,33%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/7*100
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	600%	16,67%
		2. Persentase Data Aset yang Akurat	90%	100,12 %	111%	540%	18,54%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	11,29%	7,45%	382%	27,09%	27,50%

B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik terdapat dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022, makadana besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Anggaran Program Penunjang Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG	ANGGARAN 2022		
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	943.006.353.420	909.419.193.736	96,44%
		Persentase Data Aset yang Akurat	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.890.270.300	2.865.780.300	73,67%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.576.102.890	8.217.762.269	77,70%

3.4 EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya pada Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PENUNJANG	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			EFISIENSI
				Target	Realisasi	Capaian	PAGU	REALISASI	CAPAIA N	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	943.006.353.420	909.419.193.736	96,44%	3,56%
		Persentase Data Aset yang Akurat	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	100,12%	111%	3.890.270.300	2.865.780.300	73,67%	26,33%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,95%	7,45%	382%	10.576.102.890	8.217.762.269	77,70%	22,30%
Rata-rata						197,66%	957.472.726.610	920.502.736.305	96,14%	17,40%

SASARAN I MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator yang dipertanggungjawabkan oleh dua bidang pengelolaan keuangan dan satu bidang pengelolaan aset. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Persentase Data Aset yang Akurat	90%	100,12%	111%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan sasaran strategis pertama pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berfokus pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik. Indikator pertama yaitu Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan merupakan indikator yang bertujuan mengelola segala hal yang berkaitan tentang keuangan baik merupakan penganggaran, pencairan sampai pelaporan pertanggungjawaban keuangan sedangkan indikator kedua yaitu Persentase data aset yang akurat dengan tujuan penatausahaan aset daerah dari hal pencatatan, pengelolaan hingga pelaporan barang milik daerah.

Pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan yang telah diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan rekonsiliasi setiap bulan yang selalu diadakan oleh bidang perbendaharaan guna memantau jalannya pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Selain rekonsiliasi setiap bulan, kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan melalui koordinasi dan sosialisasi yang dibebankan oleh bidang anggaran.

Upaya menyelesaikan kendala-kendala yang dialami tentunya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gresik akan menerapkan beberapa upaya dalam pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya agar menjadi lebih baik lagi, yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan akuntansi dan penyusunan modul Laporan Keuangan secara berkala;
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terkait penatausahaan keuangan pada perangkat daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan sinkronisasi yang lebih teliti data aset saat pencatatan aset;
5. Meningkatkan intensitas rekonsiliasi aset dengan perangkat daerah secara periodik (baik setiap triwulan maupun setiap semester);
6. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan perangkat daerah selaku penanggungjawab BMD sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
7. Meningkatkan koordinasi yang intens dengan pihak DJKN Kantor Wilayah Jawa Timur

SASARAN II MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Pada sasaran strategis kedua ini terdapat satu indikator yang diampu oleh bidang pendapatan, yaitu bidang pajak daerah lainnya, bidang PBB dan BPHTB serta bidang pengembangan dan informasi pendapatan daerah. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja BPPKAD pada Sasaran Strategis 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	1,95%	7,45%	382%

Meningkatnya pendapatan daerah merupakan sasaran strategis kedua pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik berfokus pada bidang pendapatan dengan program pengelolaan pendapatan daerah. Indikator pada sasaran kedua ini adalah Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah merupakan indikator yang bertujuan meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan upaya untuk mengoptimalkan pajak daerah ini dipengaruhi oleh beberapa hal, baik yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor pendukung optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Sumber Daya Manusia;
2. Kerjasama yang baik antar bidang maupun instansi;
3. Hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat;
4. Himbuan pembayar-an pajak melalui media cetak, media elektronik dan media social

Sedangkan faktor-faktor penghambat optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
2. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik yang belum menentu akibat pandemi;
3. Tidak terealisasinya penagihan secara langsung dari lapang ke lapangan akibat pembatasan.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah;
2. Melaksanakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pajak daerah;
3. Optimalisasi pendaftaran Wajib Pajak baru dan pemeriksaan tarif pajak.

Pelayanan masyarakat merupakan hal utama yang telah menjadi prioritas instansi untuk memberikan hal/imbalan terbaik kepada masyarakat. Berbagai upaya pelayanan untuk mempermudah wajib pajak dan objek pajak pembayaran, pengurusan yang berkaitan dengan Pajak Daerah maupun PBB dan BPHTB terus ditingkatkan serta dilakukan inovasi secara berkala.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik atas pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa capaian indikator kinerja dua sasaran strategis menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat hasil rata-rata capaian kinerja sebesar **>100%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”** dan rata-rata capaian anggaran sebesar **96,14%** dengan kategori **“Sangat Tinggi”** dan rata-rata efisiensi sebesar **17,40%**.

Pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 957.472.726.610,00 dan terealisasi sebesar Rp 920.502.736.305,00 atau 96,14%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah strategis melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2022 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari rencana pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya.

SARAN

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta membuat kebijakan yang efektif dalam menghadapi covid-19
2. Melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang kurang menunjang dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemberian Reward dan Punishman terkait Capaian Kinerja sehingga dapat memotivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.